

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan memainkan peran dalam pembentukan generasi unggul. Pendidikan adalah kegiatan menimba ilmu oleh individu untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang lebih dalam mengenal suatu objek (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Pengetahuan yang didapatkan secara formal tersebut menjadikan individu mempunyai pola pikir, perilaku dan moral yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya. Pendidikan dianggap sebagai indikator kesejahteraan karena dapat mendorong kapasitas inovasi dan pengembangan, produktifitas dan pertumbuhan ekonomi (Aguirreche, 2012).

Pada suatu kondisi, setiap individu dengan kesejahteraan yang berbeda-beda, akan berada pada posisi dimana mereka akan membuat pilihan yang sama ketika mereka memiliki peluang yang sama. Semua perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor eksogen yang membuat individu menghadapi kesempatan yang berbeda. Kondisi ini disebut sebagai ketimpangan kesempatan (de Barros, Molinas, & Saavedra, 2008).

Ketimpangan kesempatan juga terjadi pada pendidikan. Setiap individu akan mendapatkan pendidikan yang berbeda ketika mereka memiliki akses peluang yang sama dan menerima perlakuan yang sama, tergantung pada faktor-faktor eksogen yang mempengaruhinya. Faktor eksogen tersebut berasal dari keadaan di luar kendali individu (de Barros, Vega & Saavedra, 2008), misalnya: pendidikan orang

tua, pekerjaan orang tua, status migrasi, jenis kelamin, bahasa yang digunakan, kepemilikan buku, daerah tempat tinggal, agama (Ferreira & Gignoux, 2013); pendapatan rumah tangga, jumlah keluarga, pengeluaran rumah tangga (Rizk & Hawash, 2020); dan faktor sosial ekonomi lainnya. Jadi Ketimpangan Kesempatan Pendidikan (*Inequality of Educational Opportunity-IEO*) adalah sejauh mana pencapaian pendidikan mampu meningkatkan kapasitas individu yang bergantung pada sumber daya orangtua (*parental resources*) dan faktor keadaan (Shavit & Muller 1998; Treiman & Yip, 1989). Adanya perbedaan baik dari segi ekonomi, sosial ataupun faktor eksogen lainnya seperti kebijakan pemerintah dan kemajuan digital, membuat ketimpangan kesempatan pendidikan setiap anak sekolah tidak sama, meskipun mereka memiliki perlakuan dan akses ke peluang yang sama (de Barros, Vega & Saavedra, 2008).

Pencapaian pendidikan pada anak usia sekolah menunjukkan kemampuan setiap anak sekolah dalam mencapai usia sekolah. Usia sekolah anak yang semakin tinggi menunjukkan kemampuan keilmuan yang dimiliki juga semakin tinggi. Apabila pada usia tertentu anak sudah mencapai tingkat pendidikan sesuai dengan usianya maka ketimpangan kesempatan pendidikan menjadi kecil. Sebaliknya, apabila anak usia tersebut tidak memenuhi tingkat pendidikan yang sesuai dengan usianya maka ketimpangan kesempatan pendidikan menjadi besar. Misalnya, anak usia 18 tahun yang seharusnya sudah menduduki sekolah menengah atas, apabila anak usia tersebut hanya menyelesaikan sekolah dasar atau sekolah menengah pertama maka terjadi ketimpangan kesempatan pendidikan.

Ketimpangan kesempatan pendidikan juga terjadi di Indonesia dan menjadi permasalahan pendidikan. Pentingnya permasalahan pendidikan ini menjadikannya sebagai salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang isinya “Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua”. Hal ini juga tercantum dalam RPJMN 2015-2019 dimana tantangan pembangunan pendidikan, salah satunya “menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial-ekonomi, antar wilayah dan antar jenis kelamin”.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia secara global berada pada peringkat ke-116 dari 189 negara atau sebesar 70,81 pada tahun 2017. Jika dilihat dari skor *Programme for International School Assessment* (PISA), Indonesia ada di peringkat 62; 63 dan 64 dari 70 negara yang di evaluasi untuk kemampuan sains, matematika dan membaca pada usia anak sekolah 15 tahun (BPS, 2018). Hal ini menggambarkan pencapaian pendidikan di Indonesia masih dibawah standar pendidikan secara global.

Pada Tahun 2018, Angka Melek Huruf (AHM) untuk usia 15 tahun keatas juga belum mencapai target dari Reinstra Kemendikbud, yaitu 95,66 persen dari 96,59 persen. Pencapaian Program Indonesia Pintar (PIP) yang dilakukan pemerintah melalui wajib belajar 12 tahun (RPJMN 2015-2019) juga belum tercapai maksimal. PIP merupakan salah satu program pemerintah di bidang pendidikan yang dirancang untuk mendukung anak-anak usia sekolah 6-21 tahun memperoleh layanan pendidikan menengah, yaitu jalur pendidikan formal ataupun pendidikan non formal dari kategori keluarga miskin/ rentan miskin/ prioritas tetap.

Adapun tujuan dari program ini adalah untuk mengurangi angka putus sekolah. Pada tahun 2018, target angka putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan yang hanya sebesar satu persen, belum tercapai untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 1,67 persen dan 2,94 persen. Namun pada jenjang Sekolah Dasar (SD) target sudah tercapai yaitu sebesar 0,51 persen. Persentase anak sekolah untuk usia 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun sebesar 0,78; 4,64 dan 26,01 persen yang artinya semakin tambah usia semakin besar persentase anak yang tidak bersekolah (BPS, 2018).

Partisipasi sekolah antar jenjang pendidikan juga masih bervariasi. Hal ini tergambar dari nilai Angka Partisipasi Kasar (APK). Pada jenjang SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat, angka partisipasi kasar mengalami fluktuasi dan belum mencapai target reinstra kemendikbud dimana APK untuk SMP/ sederajat tahun 2015-2018 sebesar 91,17; 90,12; 90,23 dan 91,52 dan APK untuk SMA/ sederajat tahun 2015-2018 sebesar 78,02; 80,89; 82,84 dan 80,68. Berdasarkan kelompok pengeluaran rumah tangga, terdapat ketimpangan partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah keatas. Pendidikan hingga perguruan tinggi (PT) mampu dikecam oleh setengah dari penduduk kelompok pengeluaran teratas. Namun hanya 8 persen penduduk kelompok pengeluaran terendah, mampu mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi (BPS, 2018). Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa persoalan dalam proses pendidikan formal berasal dari masalah ekonomi.

Rata-rata lama sekolah tahun 2018 juga belum memenuhi target Renstra Kemendikbud yaitu 8,17 tahun atau kelas 2 SMP/ sederajat dari target 8,7 tahun.

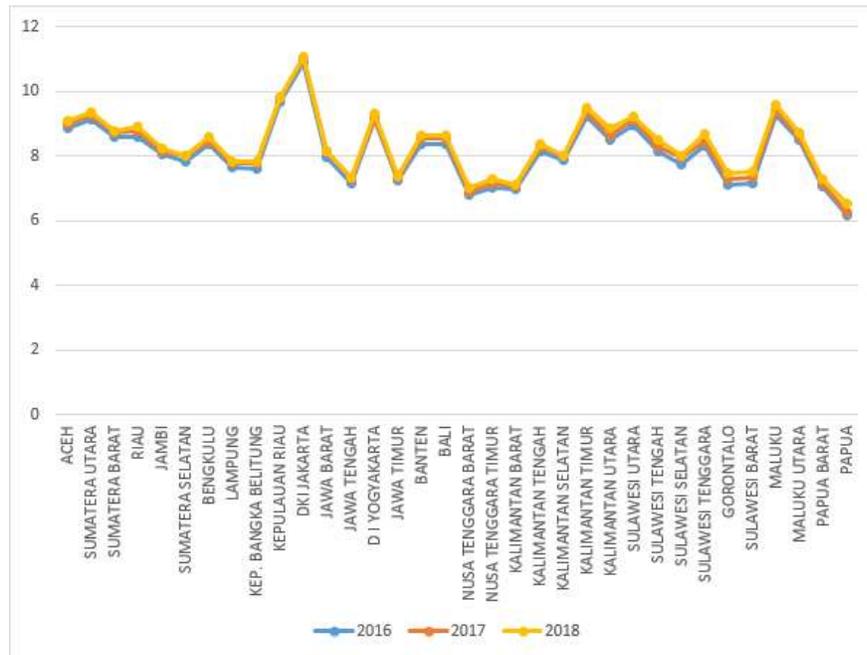
Rata-rata lama sekolah pada tahun 2018 tidak meningkat secara signifikan. Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah pada tahun 2017 sebesar 8,1 tahun; tahun 2016 sebesar 7,95 tahun dan tahun 2015 sebesar 7,84 tahun. Menurut status ekonomi, kelompok pengeluaran terbawah memiliki rata-rata sekolah 6,6 tahun atau kelas 6 SD/ sederajat dan kelompok pengeluaran teratas sebesar 11,14 tahun atau kelas 11 SMA/ sederajat. Rata-rata lama sekolah secara geografis, menunjukkan Papua memiliki rata-rata bersekolah paling singkat yaitu sampai kelas 6/ sederajat untuk usia 15 tahun keatas. Sementara DKI Jakarta memiliki rata-rata sekolah paling lama yaitu 11,05 tahun (BPS, 2018). Hal ini ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Berdasarkan informasi hasil pencapaian tersebut, dapat disimpulkan masih adanya ketimpangan kesempatan pendidikan di Indonesia. Meskipun berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia seperti Program Indonesia Pintar (PIP) berupa wajib belajar 12 tahun dan pemberian bantuan/ subsidi pendidikan, tampaknya belum berjalan secara maksimal. Kesenjangan ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam pembangunan manusia sehingga diperlukan upaya menyeluruh untuk melakukan pemerataan pendidikan di seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 1. 1 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2018

Provinsi	Rata-Rata Lama Sekolah
Aceh	9.09
Sumatera Utara	9.34
Sumatera Barat	8.76
Riau	8.92
Jambi	8.23
Sumatera Selatan	8
Bengkulu	8.61
Lampung	7.82
Kep. Bangka Belitung	7.84
Kepulauan Riau	9.81
Dki Jakarta	11.05
Jawa Barat	8.15
Jawa Tengah	7.35
D I Yogyakarta	9.32
Jawa Timur	7.39
Banten	8.62
Bali	8.65
Nusa Tenggara Barat	7.03
Nusa Tenggara Timur	7.3
Kalimantan Barat	7.12
Kalimantan Tengah	8.37
Kalimantan Selatan	8
Kalimantan Timur	9.48
Kalimantan Utara	8.87
Sulawesi Utara	9.24
Sulawesi Tengah	8.52
Sulawesi Selatan	8.02
Sulawesi Tenggara	8.69
Gorontalo	7.46
Sulawesi Barat	7.5
Maluku	9.58
Maluku Utara	8.72
Papua Barat	7.27
Papua	6.52
INDONESIA	8.17

Sumber: BPS, 2018



Sumber: BPS, 2018

Gambar 1.1 Rata-Rata Lama Sekolah Anak Usia 5-24 Tahun Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2016-2018

Selama dua dekade terakhir, terjadi pertumbuhan yang luar biasa dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). TIK menjadi sesuatu yang memungkinkan munculnya inovasi, peningkatan produktifitas, menghubungkan orang dan komunitas dan meningkatkan standar hidup dan peluang di kehidupan masyarakat modern (Duta & Mia, 2011). Dalam era yang disebut sebagai era digital ini, setiap individu diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan TIK. TIK memainkan peran penting, tidak hanya sebagai penentu untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tetapi sebagai alat yang efektif dan integral di berbagai bidang, salah satunya pendidikan (Mo, Swinnen, Zhang, Yi, Qu, Boswell & Rozelle, 2013; Tien & Fu, 2008). TIK dirasa berpengaruh dalam menunjang kualitas dan kuantitas pendidikan. Keberadaan jaringan internet

menyediakan akses informasi dan komunikasi yang cepat sehingga memotivasi sistem pengajaran yang lebih terbuka akan pengetahuan dan wawasan yang luas. Dalam menggunakan kemajuan TIK ini dibutuhkan literasi digital. Literasi digital (*digital literacy*) adalah kemampuan dan pemahaman seorang individu untuk menggunakan TIK. Tanpa literasi digital, seseorang tidak bisa memanfaatkan potensi besar teknologi (Geiger, 2015).

Kemajuan TIK juga berkembang pesat di Indonesia. TIK menjadi sarana dan kebutuhan yang semakin penting bahkan bukan lagi menjadi kebutuhan tersier. Terlepas dari perkembangan TIK tersebut, penggunaan TIK hanya tersedia bagi minoritas populasi penduduk Indonesia. Akses menggunakan TIK tidak tersedia merata untuk setiap individu. Adanya perbedaan literasi digital akibat pengaruh sosial ekonomi dan demografis membuat terjadinya kesenjangan digital antar provinsi di Indonesia. Data BPS mencatat sekitar 67 persen siswa usia 5-24 tahun mengakses TIK. Dilihat dari segi pengeluaran rumah tangga, semakin bawah kelompok pengeluaran rumah tangga, semakin kecil jumlah siswa yang menggunakan TIK. Selain itu, akses TIK oleh siswa usia 5-24 tahun di pedesaan lebih rendah dibandingkan siswa di perkotaan.

Ketimpangan kesempatan pendidikan menjadi tujuan utama dari suatu negara, dimana hal ini penting karena dapat meningkatkan perbedaan pencapaian pendidikan antar generasi muda dari status sosial yang berbeda-beda (Boudon, 1974). Ketimpangan kesempatan pendidikan menjadi masalah ekonomi karena memandang pencapaian pendidikan sebagai input mendasar dalam pembentukan pendapatan yang nantinya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan dari

individu. Ketika kesempatan memperoleh pendidikan setiap individu berbeda, menimbulkan perbedaan kesempatannya untuk melangsungkan hidup (contoh: bekerja). Akibatnya terjadi masalah ekonomi makro, seperti pengangguran dan ketimpangan pendapatan yang akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan merugikan pencapaian tujuan pembangunan Indonesia. Penelitian ini belum dilakukan sebelumnya, terlebih penelitian ini dilakukan secara spasial per provinsi yang dapat memberikan informasi lebih detail kondisi ketimpangan kesempatan pendidikan menurut provinsi di Indonesia. Penelitian ini juga memasukkan variabel subsidi pemerintah di bidang pendidikan, subsidi PIP, yang merupakan salah satu program intervensi pemerintah di bidang pendidikan. Hal ini dimaksudkan untuk melihat keefektifan dari program pemerintah untuk mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia sehingga penelitian ini dapat mendekati kondisi real dari ketimpangan kesempatan pendidikan di Indonesia.

Penelitian ini juga meneliti variabel baru yang dianggap berpengaruh terhadap ketimpangan kesempatan pendidikan di Indonesia, yaitu literasi digital. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kemajuan digital sekarang ini menuntut individu untuk memiliki literasi digital. Dengan memanfaatkan literasi digital, individu akan mendapatkan manfaat dari potensi digital seperti contohnya dalam bidang pendidikan. Berbagai program pemerintah di bidang pendidikan seperti kurikulum sekolah yang sudah berbasis digital serta banyaknya informasi pengetahuan yang bisa diperoleh dengan menggunakan kemajuan teknologi seperti akses internet, mendorong anak usia sekolah untuk memiliki literasi digital. Diharapkan dengan literasi digital yang dimiliki oleh anak usia sekolah, mampu

mengurangi ketimpangan kesempatan pendidikan. Sehingga penelitian ini juga mengukur hubungan antara ketimpangan kesempatan pendidikan terhadap literasi digital di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini merumuskan masalah:

- 1) Bagaimana kondisi ketimpangan kesempatan pendidikan di Indonesia.
- 2) Bagaimana dampak literasi digital terhadap ketimpangan kesempatan pendidikan di Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah:

- 1) Menganalisis kondisi ketimpangan kesempatan pendidikan di Indonesia.
- 2) Menganalisis dampak literasi digital terhadap ketimpangan kesempatan pendidikan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk mendapatkan informasi baru mengenai kondisi ketimpangan kesempatan pendidikan yang dihubungkan dengan literasi digital di Indonesia. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi bagi pembuat kebijakan untuk menanggulangi permasalahan dasar pendidikan akibat

ketimpangan kesempatan pendidikan, yang mana merupakan awal dari penyebab terhambatnya pembangunan manusia di Indonesia.

1.5 Lingkup Penelitian

Kontribusi terkini dalam ekonomi literatur pendidikan adalah ketimpangan dalam kesempatan pendidikan. Pada penelitian kuantitatif ini, analisis ketimpangan kesempatan pendidikan dilakukan pada anak usia 12-18 tahun. Hal ini didasari dari hasil data BPS yang menunjukkan bahwa target reinstra kemendikbud mengenai pencapaian pendidikan tidak tercapai pada usia tersebut. Variabel yang digunakan pada penelitian selain berdasarkan pada penelitian terdahulu juga disesuaikan dengan ketersediaan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun variabel dependen yang digunakan adalah lama sekolah (*years of schooling*). Untuk variabel independen, penulis menggunakan: (1) jenis kelamin; (2) penerimaan subsidi pemerintah, dalam penelitian ini berfokus pada subsidi Program Indonesia Pintar (PIP); (3) pendidikan orangtua, dalam hal ini peneliti menggunakan pendidikan kepala rumah tangga karena dapat menjangkau untuk anak yang memiliki orangtua tunggal atau tidak memiliki orangtua; (4) jumlah anggota rumah tangga; dan (5) pengeluaran per kapita. Ferreira & Gignoux (2013) melakukan analisis ketimpangan kesempatan pendidikan anak menggunakan variabel: jenis kelamin, pendidikan ayah dan ibu (orangtua), pekerjaan ayah dan faktor keadaan lainnya. Rizk & Hawash (2020) meneliti ketimpangan pendidikan anak menggunakan variabel *outcome*, yaitu lama sekolah serta pengeluaran rumah tangga dan jumlah keluarga sebagai variabel yang mempengaruhinya.

Sejalan dengan itu, keterjangkauan dalam kemajuan Teknologi dan Informasi Komunikasi (TIK) telah menjembatani ketimpangan kesempatan pendidikan yang dihasilkan dari ketimpangan pendapatan. Keterbatasan literasi digital di Indonesia menyebabkan permasalahan baru. Padahal TIK dapat menjadi solusi untuk meningkatkan peluang kesempatan pendidikan karena mampu meningkatkan kebebasan substantif individu dalam mendapatkan pendidikan. Liao, Chang, Wang & Sung (2016) menganalisis faktor yang mempengaruhi perbedaan literasi digital (*digital literacy*) menggunakan variabel akses internet dan kepemilikan alat TIK (seperti komputer). Ono & Zavodny (2007) juga menganalisis perbedaan literasi digital menggunakan variabel kepemilikan komputer dan penggunaan akses internet. Barrantes (2007) mengategorikan literasi digital berdasarkan kepemilikan alat TIK dan penggunaan akses internet rumah tangga. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan istilah literasi digital karena menganggap istilah ini paling tepat untuk menggambarkan sejauh mana kemampuan dan pemahaman anak usia sekolah terhadap kemajuan digital.

Isu tersebut dirasa penting untuk diteliti karena ketimpangan kesempatan pendidikan dapat menjadi penghambat bagi perkembangan pendidikan. Dimana pendidikan merupakan pilar dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, penelitian kuantitatif ini menganalisis kondisi dan faktor ketimpangan kesempatan pendidikan di Indonesia yang disajikan menurut provinsi. Serta melihat dampak dari literasi digital terhadap ketimpangan kesempatan pendidikan di Indonesia. Data bersumber dari Survei Sensus Ekonomi (SUSENAS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian ini menggunakan data *cross*

section tahun 2018. Penelitian menggunakan data terbaru yang dipublikasikan oleh BPS sebagai lembaga resmi pemerintah Indonesia.

Selanjutnya, penelitian ini mengadopsi metode varians dari regresi *Ordinary Least Square* (OLS) yang dikembangkan oleh Ferreira & Gignoux (2013) untuk menghitung ketimpangan kesempatan pendidikan dan mengkategorikan literasi digital menggunakan metode Barrantes (2007) dan menghitung indeksinya menggunakan perbandingan rasio. Untuk menganalisis dampak literasi digital terhadap ketimpangan kesempatan pendidikan di Indonesia, analisis regresi linear sederhana digunakan dalam penelitian ini.